BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah memiliki tanggungjawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Keilmuan dan tingkat pendidikan juga tanggungjawab fungsional dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan sesuai ketentuan jabatannya (Andiawati, 2017).

Andiawati (2017) juga menjelaskan empat komponen yang berkaitan dengan jabatan dalam pendidikan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu Staf Administrasi, Staf Teknis Pendidikan meliputi Kepala Sekolah, dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional sekolah, dan peserta didik sebagai komponen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempat komponen harus berjalan dengan sinergis karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuk dari hubungan timbal balik dari keempat komponen tersebut, mengingat kebutuhan akan pendidikan sangat tinggi, perlu adanya kesiapan yang optimal untuk kebutuhan peserta didik.

Aspek penting untuk mencetak peserta didik adalah aspek keuangan. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan/sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan keuangan yang efektif agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah yang efektif dan efisien maka dibutuhkan sarana dan prasarana

yang memadai untuk menunjang keberhasilan dari pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah tersebut (Sukur dan Puspitasari, 2020).

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan dengan efektif. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan keuangan, pembukuan setiap transaksi, memiliki laporan pertanggungjawaban guna terwujudnya akuntabilitas, dan pengawasan (Hidayat, 2016).

Akuntabilitas menurut Hadijah (2019) adalah pertanggungjawaban yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditunjukan kepada yang memberi wewenang. Sedangkan menurut PP No.48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang dilaksanakan dalam sekolah kepada *stakeholders* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan (Hadijah, 2019).

Mesiono (2018) menjelaskan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah dapat dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor, yaitu keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia, keberhasilan dalam mengelola perlengkapan, keberhasilan dalam mengelola biaya dan dana, keberhasilan dalam mengelola metodenya. Keberhasilan mengelola komponen manajemen harus dikaitkan dengan keberhasilan melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam

pengelolaan diantaranya fungsi *planning*, fungsi *Organizing*, fungsi *staffing*, fungsi *controlling*, dan fungsi *communicating*. Apabila fungsi tersebut tidak diterapkan maka akan terjadi kendala dalam proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Bendahara Sekolah Dasar Negeri 1 Ngrandu pada tanggal 03 Desember 2020ditemukan beberapa kendala penyusunan dan pengelolaan keuangan sekolah, kendala pertama mengenai juknisjuknis yang diberikan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan sering kali berubah-ubah. Hal ini membuat para tim pengelola kebingungan saat penyusunan karena tidak adanya peraturan yang menjadi acuan. Kedua, mengenai kurangnya ketepatan waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pengiriman berkas ke dinas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya staf tenaga administrasi keuangan sekolah yang masih kurang mampu dan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selama ini penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh guru yang notabenenya sebagai pengajar. Jadi membuat proses pengelolaan keuangan kurang maksimal. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memahami akuntansi dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif. Pemahaman standar akuntansi didukung dengan kompetensi Sumber Daya Manusia akan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan sekolah sehinggamampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan sebaik-baiknya dan dapat menciptakan tata kelola sekolah yang baik (Sulasih, 2020).

Sistem pengelolaan keuangan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggungjawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena

sebuah lembaga pendidikan yang baik tentu memiliki pengelolaan keuangan yang baik pula untuk mencapai target yang diinginkan (Canterwall dan Nolin, 2019). Lembaga pendidikan/sekolah memiliki pengaturan terkait penyerapan anggaran sekolah yang digunakan untuk menjalankan operasional pendidikan. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa operasional kegiatan pendidikan perlu adanya manajemen keuangan dalam mengatur tata kelola penggajian pendidik, dan tenaga kependidikan, tenaga tata usaha, memperbaiki sarana dan prasarana. Untuk membantu masalah operasional sekolah, pemerintah memberikan dana yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada lembaga pedidikan/sekolah untuk membantu pembiayaan peserta didik agar mampumenunjang sarana prasarana pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan sekolah, biaya ulangan umum harian, dan biaya honor guru (Widyatmoko, 2017).

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang pengelolaan kegiatan belajar mengajar harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Syarat tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana yaitu sekolah harus memiliki lahan terhadap peserta didik, dan sekurang-kurangnya memiliki prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang laboraturium, ruang UKS, kamar mandi, gudang, tempat beribadah, ruang sirkulasi, tempat bermian dan berolahraga. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal (Latifah, 2017). Selain sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan pendidikan terdapat Komponen yang sangat mendasar yang cukup signifikan dalam semua kegiatan pengelolaan sekolah adalah

komponen sumber daya manusia, karena yang menjalankan fungsi dari pengelolaan sekolah adalah manusianya, komponen lain sebagai pendukung (Mesiono, 2018).

Pengelola keuangan harus memiliki pemahaman terhadap Standar Akuntansi yang berlaku, karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif, dibutuhkan orang yang berkualitas mampu mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan standar dan pedoman pada ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang efektif yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat dimengerti dan mudah dipahami, informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemahaman standar akuntansi merupakan satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan, karena dengan standar akuntansi akan mempermudah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Apabila bidang keuangan diisi dengan sumber daya manusia yang tidak berkompetensi dalam memahami standar akuntansi maka pengelolaan keuangan akan kurang efektif dan efisien (Hani'ah, 2015).

Lembaga pendidikan/sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi. Didukung dengan latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam memahami serta menguasai praktik akuntansi akan memengaruhi terhadap kesalahan dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi yang berlaku sehingga hasil dari laporan keuangan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan selanjutnya (Basiya,dkk, 2019). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fauzan (2020) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dibidang keuangan berpengaruh terhadap kinerja

keuangan sekolah, hampir seluruh sumber daya manusia bidang keuangan di sekolah harus memiliki pendidikan yang baik berkaitan dengan profesinya, sudah mengikuti pelatihan serta sudah berpengalaman dan mengerti standart akuntansi untuk acuan pengelolaan keuangan.

Menurut penelitian Sutrisna (2017) mengenai efektivitas pengelolaan keuangan sekolah menemukan beberapa masalah pada saat proses pengelolaan keuangan yaitu mengenai ketepatan waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pengiriman berkas ke dinas pendidikan. Keterlambatan tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia tenaga administrasi keuangan sekolah yang masih kurang dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Windarti (2015) menemukan bahwa karakteristik pengelola keuangan dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Tingkat pendidikan, pengalaman pengelola keuangan sekolah dan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

Dalam efektivitas pengelolaan keuangan menurut Tandililing (2019) diperlukan akuntabilitas keuangan sekolah, karena akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap motovasi mengajar guru. Begitu juga dengan Anam (2019) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa sumber dana sekolah yang didapatkan dari masyarakat dan pemerintah harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintahan guna perwujudan akuntabilitas dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan/sekolah tersebut. Berdasarkan permasalahan, teori, dan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas Peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Standar Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kauman".

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah?
- b. Apakah pemahaman Standart Akuntansi Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah?
- c. Apakah Kompetensi Sumber Daya Menusia Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah?
- d. Apakah Akuntabilitas, Pemahaman Standar Akuntansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji:

- a. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.
- b. Pengaruh Pemahaman Standart Akuntansi terhadap Efektivitas
 Pengelolaan Keuangan.
- c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.

d. Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Standart Akuntansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitisn ini adalah:

a. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai "Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Standar Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah".

b. Bagi Pihak Sekolah Dasar Negeri

Memberikan masukan mengenai perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyusun laporan keuangan dan menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaporan laporan keuangan yang selama ini sudah dibuat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi tambahan acuan dan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.